



**WALI KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dibahas bersama, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 54);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
  - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - Neraca;
  - Laporan Operasional;
  - Laporan Arus Kas;
  - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dengan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 5.023.080.346.608,29
b. belanja	<u>Rp 4.499.145.144.311,87</u>
surplus	Rp 523.935.202.296,42
c. pembiayaan	
penerimaan	Rp 622.661.218.417,83
pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
pembiayaan netto	<u>Rp 622.661.218.417,83</u>
sisa lebih pembiayaan	
anggaran tahun berkenaan	Rp 1.146.596.420.714,25

## Pasal 3

Uraian laporan realisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp185.883.828.510,71), dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 5.208.964.175.119,00        |
| 2. realisasi                             | <u>Rp 5.023.080.346.608,29</u> |
| selisih (kurang)                         | (Rp 185.883.828.510,71)        |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp1.232.249.917.963,13) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp 5.731.395.062.275,00        |
| 2. realisasi                          | <u>Rp 4.499.145.144.311,87</u> |
| selisih (kurang)                      | (Rp 1.232.249.917.963,13)      |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp1.046.366.089.452,42, dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. defisit setelah perubahan | Rp(522.430.887.156,00)       |
| 2. realisasi                 | <u>Rp 523.935.202.296,42</u> |
| selisih (lebih)              | Rp 1.046.366.089.452,42      |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp230.331.261,83, dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 622.430.887.156,00        |
| 2. realisasi  | <u>Rp 622.661.218.417,83</u> |
| selisih (lebih)                                     | Rp 230.331.261,83            |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp100.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 100.000.000.000,00 |
| 2. realisasi   | <u>Rp 0,00</u>        |
| selisih  | Rp 100.000.000.000,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp100.230.331.261,83, dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 522.430.887.156,00        |
| 2. realisasi                                   | <u>Rp 622.661.218.417,83</u> |
| selisih (lebih)                                | Rp 100.230.331.261,83        |

## Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal             | Rp 622.430.887.156,83          |
| b. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran | <u>Rp 1.146.596.420.714,25</u> |
| c. saldo anggaran lebih akhir            | Rp 1.146.596.420.714,25        |

## Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021, sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 34.575.279.681.182,44
b. jumlah kewajiban	Rp <u>119.015.428.567,94</u>
c. jumlah ekuitas	Rp 34.456.264.252.614,50

## Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

a. pendapatan LO	Rp 5.024.566.404.587,36
b. beban	Rp <u>4.634.478.989.911,02</u>
surplus	Rp 388.287.782.788,34

## Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut:

a. saldo awal kas per 1 Januari 2021	Rp 622.555.242.492,91
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 1.098.539.819.435,42
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp (574.604.617.139,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp 0,00
f. saldo akhir kas di bud	Rp 1.146.596.420.714,25
g. kas di bendahara penerimaan	Rp 0,00
h. kas di bendahara pengeluaran	Rp 0,00
i. kas di bendahara swadana	Rp 0,00
j. kas lainnya	Rp 0,00
k. kas di bos	Rp 0,00
l. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp 1.146.596.420.714,25

## Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp 33.785.239.483.406,48
b. surplus/defisit LO	Rp 388.287.782.788,34
c. koreksi ekuitas lainnya	Rp 282.736.986.419,68
d. ekuitas akhir	Rp 34.456.264.252.614,50

## Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 8 Agustus 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA :  
(3-82/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031





**PERMINTAH KOTA MEDAN**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	5.208.964.175.119,00	5.023.080.346.608,29	(185.883.828.510,71)	96,43
4.1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	245.207.869.274,00	173.119.200.202,24	(72.088.669.071,76)	70,60
4.1.02	<b>Kesehatan</b>	240.526.418.615,00	168.790.674.135,24	(71.735.744.479,76)	70,18
4.1.02.1-02-0-00-0-00.01	Dinas Kesehatan	240.526.418.615,00	168.790.674.135,24	(71.735.744.479,76)	70,18
4.1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	145.750.000,00	203.900.000,00	58.150.000,00	139,90
4.1.03.1-02-0-00-0-00.14	Dinas Pekerjaan Umum	145.750.000,00	203.900.000,00	58.150.000,00	139,90
4.1.04	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	2.235.700.659,00	2.192.462.967,00	(43.237.692,00)	98,07
4.1.04.1-04-1-03-0-00.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	2.235.700.659,00	2.192.462.967,00	(43.237.692,00)	98,07
4.1.05	<b>Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	2.300.000.000,00	1.932.163.100,00	(367.836.900,00)	84,01
4.1.05.1-05-0-00-0-00.06	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran	2.300.000.000,00	1.932.163.100,00	(367.836.900,00)	84,01
4.2	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	105.417.967.286,00	89.372.407.210,00	(16.045.560.076,00)	84,78
4.2.05	<b>Lingkungan Hidup</b>	30.573.886.043,00	22.040.447.450,00	(8.533.438.593,00)	72,09
4.2.05.2-11.1-03-0-00.12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	30.573.886.043,00	22.040.447.450,00	(8.533.438.593,00)	72,09
4.2.09	<b>Perhubungan</b>	37.217.641.650,00	19.947.943.209,00	(17.269.698.441,00)	53,60
4.2.09.2-15-0-00-0-00.01	Dinas Perhubungan	37.217.641.650,00	19.947.943.209,00	(17.269.698.441,00)	53,60
4.2.12	<b>Penanaman Modal</b>	37.626.439.593,00	47.384.016.551,00	9.757.576.958,00	125,93
4.2.12.2-18-0-00-0-00.23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37.626.439.593,00	47.384.016.551,00	9.757.576.958,00	125,93
4.3	<b>Urusan Pilihan</b>	500.000.000,00	686.073.200,00	186.073.200,00	137,21
4.3.06	<b>Perdagangan</b>	500.000.000,00	686.073.200,00	186.073.200,00	137,21
4.3.06.3-30-0-00-0-00.01	Dinas Perdagangan	500.000.000,00	686.073.200,00	186.073.200,00	137,21
4.4	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	4.857.838.338.559,00	4.759.902.665.996,05	(97.935.672.562,95)	97,98
4.4.04	<b>Keuangan</b>	4.857.838.338.559,00	4.759.902.665.996,05	(97.935.672.562,95)	97,98
4.4.04.5-02-0-00-0-00.02	SKPKD	3.069.724.231.645,00	3.116.568.157.561,00	46.843.925.916,00	101,53
4.4.04.5-02-0-00-0-00.05	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.713.934.904.956,00	1.528.643.673.796,00	(185.291.231.160,00)	89,19

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
5. 4.11. 7-01.0-00.0-00.21. 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	29.595.823.610,00	20.595.274.293,00	(9.000.549.317,00)	69,59	
5. 4.11. 7-01.0-00.0-00.21. 1.1	Belanja Pegawai	13.025.373.000,00	11.312.785.468,00	(1.712.587.532,00)	86,85	
5. 4.11. 7-01.0-00.0-00.21. 1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.570.450.610,00	9.282.488.825,00	(7.287.961.785,00)	56,02	
5. 4.11. 7-01.0-00.0-00.21. 2	<b>BELANJA MODAL</b>	406.738.111,00	382.815.000,00	(23.923.111,00)	94,12	
5. 4.11. 7-01.0-00.0-00.21. 2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	406.738.111,00	382.815.000,00	(23.923.111,00)	94,12	
5. 4.11. 7-01.0-00.0-00.21. 2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jarringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. 4.12	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	33.086.630.000,00	21.982.899.239,00	(11.103.730.761,00)	66,44	
5. 4.12. 8-01.0-00.0-00.01	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	33.086.630.000,00	21.982.899.239,00	(11.103.730.761,00)	66,44	
5. 4.12. 8-01.0-00.0-00.01. 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	32.897.865.600,00	21.859.399.239,00	(11.038.466.361,00)	66,45	
5. 4.12. 8-01.0-00.0-00.01. 1.1	Belanja Pegawai	7.027.082.000,00	5.312.097.901,00	(1.714.984.099,00)	75,59	
5. 4.12. 8-01.0-00.0-00.01. 1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.230.956.520,00	1.799.356.508,00	(1.431.600.012,00)	55,69	
5. 4.12. 8-01.0-00.0-00.01. 1.1.5	Belanja Hibah	22.639.827.080,00	14.747.944.830,00	(7.891.882.250,00)	65,14	
5. 4.12. 8-01.0-00.0-00.01. 2	<b>BELANJA MODAL</b>	188.764.400,00	123.500.000,00	(65.264.400,00)	65,43	
5. 4.12. 8-01.0-00.0-00.01. 2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.764.400,00	123.500.000,00	(65.264.400,00)	65,43	
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
6. 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
6. 4.04	Keuangan					
6. 4.04. 5-02.0-00.0-00.02	<b>SKPKD</b>					
6. 4.04. 5-02.0-00.0-00.02. 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	622.430.887.156,00	622.661.218.417,83	230.331.261,83	100,04	
6. 4.04. 5-02.0-00.0-00.02. 1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	622.430.887.156,00	622.661.218.417,83	230.331.261,83	100,04	
6. 4.04. 5-02.0-00.0-00.02. 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	100.000.000.000,00	0,00	(100.000.000.000,00)	0,00	
6. 4.04. 5-02.0-00.0-00.02. 2.2	Penyerahan Modal Daerah	100.000.000.000,00	0,00	(100.000.000.000,00)	0,00	

WALI KOTA MEDAN,

t t d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTTON

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
YUNITA SARI, S.H.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19700622 200701 2 031



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
		2021	2021		2020
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	5.208.964.175.119,00	5.023.080.346.608,29	96,43	4.121.585.751.572,01
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	2.139.239.943.474,00	1.906.512.189.047,29	89,12	1.509.483.588.167,01
4.1.1	Pajak Daerah	1.693.934.904.956,00	1.495.751.738.668,00	88,30	1.195.850.162.642,00
4.1.1.1	Retribusi Daerah	118.230.575.004,00	123.663.556.072,00	104,60	89.720.470.517,15
4.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.800.000.000,00	16.204.047.293,00	81,84	17.831.106.538,27
4.1.1.3	Lain-lain PAD yang Sah	307.274.463.514,00	270.892.847.014,29	88,16	206.081.848.469,59
4.1.4					
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.942.065.031.645,00	2.977.574.253.244,00	101,21	2.478.930.403.405,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.044.363.347.000,00	2.059.980.280.796,00	100,76	2.064.761.606.978,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.044.363.347.000,00	2.059.980.280.796,00	100,76	2.056.223.073.978,00
4.2.1.1.1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	8.538.533.000,00
4.2.1.1.2					
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	897.701.684.645,00	917.593.972.448,00	102,22	414.168.796.427,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	897.701.684.645,00	917.593.972.448,00	102,22	414.168.796.427,00
4.2.2.1.1					
4.2.2.1.2					
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	127.659.200.000,00	138.993.904.317,00	108,88	133.171.760.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	6.450.000.000,00	0,00	133.171.760.000,00
4.3.1.1					
4.3.1.2					
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	127.659.200.000,00	132.543.904.317,00	103,83	0,00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.731.395.062.275,00	4.499.145.144.311,87	78,50	3.993.254.230.493,55
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.721.486.070.425,00	3.833.501.098.374,87	81,19	3.516.690.143.050,27
5.1.1	Belanja Pegawai	2.061.059.323.800,00	1.703.889.945.639,87	82,67	1.632.490.187.679,91
5.1.1.1					
5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.307.001.676.891,00	1.823.152.911.869,00	79,03	1.607.132.063.794,36
5.1.1.5	Belanja Hibah	281.649.969.734,00	254.800.940.866,00	90,47	218.185.297.576,00
5.1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	71.775.100.000,00	51.657.300.000,00	71,97	58.882.594.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	863.671.114.667,00	574.604.617.139,00	66,53	308.278.278.057,33
5.2.1	Belanja Modal Tanah	98.632.751.194,00	26.369.688.405,00	26,74	20.687.014.370,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.895.263.303,00	228.537.294.179,00	84,05	140.371.210.707,00
5.2.2.2					
5.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.765.379.738,00	139.454.699.511,00	85,16	64.180.662.191,00
5.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	325.718.219.680,00	176.879.177.157,00	54,30	81.829.575.489,33
5.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.659.500.752,00	3.363.757.887,00	91,92	1.209.815.300,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	146.237.877.183,00	91.039.428.798,00	62,25	168.285.809.385,95
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	146.237.877.183,00	91.039.428.798,00	62,25	168.285.809.385,95
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(522.430.887.156,00)	523.935.202.296,42	(100,29)	128.331.521.078,46
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	622.430.887.156,00	622.661.218.417,83	100,04	504.099.366.078,37
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	622.430.887.156,00	622.661.218.417,83	100,04	504.099.366.078,37
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	100.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
6.2.2	Penyerahan Modal Daerah	100.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	522.430.887.156,00	622.661.218.417,83	119,19	494.099.366.078,37
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	1.146.596.420.714,25	0,00	622.430.887.156,83

WALI KOTA MEDAN,

t t d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTTON

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
YUNITA SARI, S.H.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19700622 200701 2 031



**PERMINTAH KOTA MEDAN**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(% )	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5	6	7		
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	5.208.964.175.119,00	5.023.080.346.608,29	(185.883.828.510,71)	96,43			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	2.139.239.943.474,00	1.906.512.189.047,29	(232.727.754.426,71)	89,12			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4.1.1	Pajak Daerah	1.693.934.904.956,00	1.495.751.738.668,00	(198.183.166.288,00)	88,30			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	118.230.575.004,00	123.663.556.072,00	5.432.981.068,00	104,60			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.800.000.000,00	16.204.047.293,00	(3.595.952.707,00)	81,84			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	307.274.463.514,00	270.892.847.014,29	(36.381.616.499,71)	88,16			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.942.065.031.645,00	2.977.574.253.244,00	35.509.221.599,00	101,21			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.044.363.347.000,00	2.059.980.280.796,00	15.616.933.796,00	100,76			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	897.701.684.645,00	917.593.972.448,00	19.892.287.803,00	102,22			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	127.659.200.000,00	138.993.904.317,00	11.334.704.317,00	108,88			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	0,00			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	127.659.200.000,00	132.543.904.317,00	4.884.704.317,00	103,83			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.731.395.062.275,00	4.499.145.144.311,87	(1.232.249.917.963,13)	78,50			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00	<b>Non Program</b>	0,00	133.012.831.025,00	133.012.831.025,00	0,00			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.0.00	<b>Non Kegiatan</b>	0,00	133.012.831.025,00	133.012.831.025,00	0,00			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00	<b>Sub Kegiatan</b>	0,00	133.012.831.025,00	133.012.831.025,00	0,00			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0,00	133.012.831.025,00	133.012.831.025,00	0,00			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	43.052.576,00	43.052.576,00	0,00			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 00.0.00.00 . 5.1.5	Belanja Hibah	0,00	132.969.778.449,00	132.969.778.449,00	0,00			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.024.101.093.067,00	2.506.473.966.507,87	(517.627.126.559,13)	82,88			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	6.759.919.014,00	3.675.944.206,00	(3.083.974.808,00)	54,38			
0.00 . x-xx.x-xx.x-xx.xx . 01.2.01.01	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	2.900.304.170,00	1.794.616.400,00	(1.105.687.770,00)	61,88			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

WALI KOTA MEDAN,

t t d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTTON

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
YUNITA SARI, S.H.

PENATA TINGKAT I

NIP. 19700622 200701 2 031



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI				
		KELOMPOK BELANJA				
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	
1	2	3	4	5	6	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	2.383.919.101.385,00	596.175.971.875,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pendidikan</b>	2.020.531.345.020,00	400.684.969.911,00	0,00	0,00	0,00
1.01	<b>Dinas Pendidikan</b>	927.619.017.083,00	17.567.351.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.01	<i>Non Program</i>	827.061.828.500,00	16.803.564.740,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	927.619.017.083,00	17.567.351.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 00.0,00	<i>Non Sub Kegiatan</i>	827.061.828.500,00	16.803.564.740,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 00.0,00.00	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	132.969.778.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2,01	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2,01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	132.969.778.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2,01.04		132.969.778.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758.455.345.939,00	2.049.573.800,00	0,00	0,00	0,00
		665.868.372.241,00	1.580.365.450,00	0,00	0,00	0,00
		734.792.720,00	122.690.600,00	0,00	0,00	0,00
		244.243.750,00	47.745.000,00	0,00	0,00	0,00
		349.273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				TRANSFER
		REALISASI				
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	
1	2	3	4	5	6	
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	48.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	47.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	81.799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	95.658.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	1.096.118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	840.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.096.118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	840.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	4.721.486.070.425,00	863.671.114.667,00	146.237.877.183,00		0,00
		3.833.501.098.374,87	574.604.617.139,00	91.039.428.798,00		0,00

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,**

  
**YUNITA-SARI, S.H.**  
**PENATA TINGKAT I**  
**NIP. 19700622 200701 2 031**

**WALI KOTA MEDAN,**  
**MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTTON**

t t d



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
		3	4	5	6	7=4+5-6
1	Pajak Daerah	2021	1,523,468,553,844.63	769,748,621,354.95	641,894,676,964.56	1,651,322,498,235.02
2	Retribusi Daerah	2021	11,678,010,882.00	2,915,536,116.00	1,237,225,776.00	13,356,321,222.00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2021	1,157,901,485.00	988,397,089.00	0.00	2,146,298,574.00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2021	12,461,781,450.44	119,526,095,753.59	104,577,785,645.09	27,410,091,558.94
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2021	433,860,074,737.00	256,046,755,806.00	433,860,074,737.00	256,046,755,806.00
	<b>Jumlah</b>		<b>1,982,626,322,399.07</b>	<b>1,149,225,406,119.54</b>	<b>1,181,569,763,122.65</b>	<b>1,950,281,965,395.96</b>

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19700622 200701 2 031

WALI KOTA MEDAN,  
  
tt d  
  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH  
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1,651,322,498,235.02	(784,497,246,862.04)	866,825,251,372.98
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	13,356,321,222.00	(12,479,642,771.00)	876,678,451.00
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,146,298,574.00	-	2,146,298,574.00
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	27,118,343,558.94	(2,844,750,521.82)	24,273,593,037.12
5	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	291,748,000.00	(291,748,000.00)	0.00
6	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	256,046,755,806.00	-	256,046,755,806.00
	Jumlah	1,950,281,965,395.96	(800,113,388,154.86)	1,150,168,577,241.10

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

WALI KOTA MEDAN,

tt d



YUNITA SARI, S.H.

PENATA TINGKAT I

NIP. 19700622 200701 2 031

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

TAHUN ANGGARAN 2021

No.	S K P D	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
1	NIHIL			
Jumlah		NIHIL		

WALI KOTA MEDAN,

tt d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.

PENATA TINGKAT I

NIP. 19700622 200701 2 031

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2021	PT. Bank Sumut	Laporan Keuangan Pemko Medan Tahun 2021	Rupiah	76,412,995,281,53	76,412,995,281,53	0,00	76,412,995,281,53	0,00	76,412,995,281,53	76,412,995,281,53	0,00	

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, S.H.  
 PENATA TINGKAT I  
 NIP. 19700622 200701 2 031

WALI KOTA MEDAN,

tt d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
 DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021


(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal		Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang				
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8	9=6+7-8
1	Tanah	27,139,943,961,877.50	7,949,007,000.00	0.00	27,147,892,968,877.50	297,969,361,550.00	346,662,548,549.30	27,099,199,781,878.20
2	Peralatan dan Mesin	1,699,723,742,417.82	389,440,000.01	49,579,917.03	1,700,063,602,500.80	431,034,103,602.12	204,165,173,017.78	1,926,932,533,085.14
3	Gedung dan Bangunan	1,702,630,732,738.77	0.00	0.00	1,702,630,732,738.77	278,685,907,145.04	212,518,987,336.08	1,768,797,652,547.73
4	Jalan Irigasi Jaringan	5,799,952,310,418.21	0.00	0.00	5,799,952,310,418.21	332,091,749,298.32	112,195,873,780.17	6,019,848,185,936.36
5	Aset Tetap Lainnya	58,400,330,494.31	0.00	0.00	58,400,330,494.31	30,358,870,858.18	24,247,412,173.19	64,511,789,179.30
6	KDP	115,815,882,625.67	0.00	0.00	115,815,882,625.67	67,780,613,780.00	190,828,000.00	183,405,668,405.67
	Jumlah	36,516,466,960,572.30	8,338,447,000.01	49,579,917.03	36,524,755,827,655.30	1,437,920,606,233.66	899,980,822,856.51	37,062,695,611,032.40

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

WALI KOTA MEDAN,  
 t t d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

  
 YUNITA SARI, S.H.  
 PENATA TINGKAT I  
 NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP  
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal		Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021
			Bertambah	Berkurang		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah	27.139.943,961,877.50	7,949,007,000.00	0.00	27,147,892,968,877.50	297,969,361,550.00	346,662,548,549.30	27,099,199,781,878.20
2	Peralatan dan Mesin	1,699,723,742,417.82	389,440,000.01	49,579,917.03	1,700,063,602,500.80	431,034,103,602.12	204,165,173,017.78	1,926,932,533,085.14
3	Gedung dan Bangunan	1,702,630,732,738.77	0.00	0.00	1,702,630,732,738.77	278,685,907,145.04	212,518,987,336.08	1,768,797,652,547.73
4	Jalan Irigasi Jaringan	5,799,952,310,418.21	0.00	0.00	5,799,952,310,418.21	332,091,749,298.32	112,195,873,780.17	6,019,848,185,936.36
5	Aset Tetap Lainnya	58,400,330,494.31	0.00	0.00	58,400,330,494.31	30,358,870,858.18	24,247,412,173.19	64,511,789,179.30
6	KDP	115,815,882,625.67	0.00	0.00	115,815,882,625.67	67,780,613,780.00	190,828,000.00	183,405,668,405.67
7	Akumulasi Penyusutan	(5,430,430,893,921.95)	(264,258,035.00)	(15,041,085.75)	(5,430,680,110,871.21)	(607,441,367,593.16)	(7,950,422,152.72)	(6,030,171,056,311.65)
	<b>Jumlah</b>	<b>31,086,036,066,650.30</b>	<b>8,074,188,965.01</b>	<b>34,538,831.28</b>	<b>31,094,075,716,784.10</b>	<b>830,479,238,640.50</b>	<b>892,030,400,703.79</b>	<b>31,032,524,554,720.75</b>

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19700622 200701 2 031

WALI KOTA MEDAN,  
tt d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan  
 PER 31 DESEMBER 2021

NO.	SKPD	SALDO AWAL	BERKURANG				REKLASIFIKASI				PENGHA PUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	TANAH	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
1	Dinas Pekerjaan Umum	3,410,610,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,947,334,750.00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	112,405,271,875.67	-	-	-	-	190,828,000.00	-	38,894,432,980.00	349,456,800.00	-	151,458,333,655.67
	Jumlah	115,815,882,625.67	-	-	-	-	190,828,000.00	-	38,894,432,980.00	28,886,180,800.00	-	183,405,668,405.67

WALI KOTA MEDAN,

t t d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
 YUNITASARI, S.H.  
 PENATA TINGKAT I  
 NIP. 19700622 200701 2 031

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA  
PER 31 DESEMBER 2021

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tagihan jangka Panjang Angsuran BOT	13,503,469,707.00	14,460,705,299.21	15,759,152,324.06	12,205,022,682.15
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	338,550,426,659.52	0.00	0.00	338,550,426,659.52
3	Aset Tidak Berwujud	13,776,470,166.35	1,132,482,500.00	0.00	14,908,952,666.35
4	Aset Lain-lain	318,318,159,915.24	6,765,832,539.75	24,459,040,799.75	300,624,951,655.24
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1,101,942,282.01)	0.00	239,933,842.77	(1,341,876,124.78)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5,885,796,584.64)	(680,973,444.00)	809,921,827.13	(7,376,691,855.77)
	Jumlah	677,160,787,581.46	21,678,046,894.96	41,268,048,793.71	657,570,785,682.71

WALI KOTA MEDAN,

t t d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.

PENATA TINGKAT I

NIP. 19700622 200701 2 031



LAMPIRAN XVI  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**  
PER 31 DESEMBER 2021

(dalam rupiah)

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-			===== NIHIL	===== NIHIL		
Jumlah					===== NIHIL	===== NIHIL		

WALI KOTA MEDAN,

t t d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK  
PER 31 DESEMBER 2021

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		Saldo Akhir
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	124,355,377.98	-	1,890,824.00	122,464,553.98
2	Pendapatan Diterima Dimuka	12,311,907,874.38	21,729,150,513.58	12,311,907,874.38	21,729,150,513.58
3	Utang Belanja	91,841,304,225.00	101,950,260,880.17	101,197,747,904.79	92,593,817,200.38
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1,385,646,003.00	3,441,746,470.00	257,396,173.00	4,569,996,300.00
	Jumlah	105,663,213,480.36	127,121,157,863.75	113,768,942,776.17	119,015,428,567.94

WALI KOTA MEDAN,

t t d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19700622 200701 2 031



LAMPIRAN XIX  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Daftar Sub Kegiatan-Sub Kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran

Berikutnya

*Tahun Anggaran 2021*

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (TAHUN T-2, TAHUN T-1, TAHUN T)			JUMLAH AKUMULASI (REALISASI S.D. TAHUN T)	JUMLAH YANG DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD
			REALISASI TAHUN T-2	REALISASI TAHUN T-1	REALISASI TAHUN T		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8
<b>NIHIL</b>							

WALI KOTA MEDAN

t t d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19700622 200701 2 031



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN**  
**FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
1	2	3	4	5	6
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	<b>Pelayanan Umum</b>	1.352.370.380,981,00	63.666.006.393,00	146.237.877.183,00	0,00
1	Pangan	961.060.050.405,00	48.216.831.174,00	91.039.428.798,00	0,00
1	Komunikasi dan Informatika	19.966.395.428,00	2.160.700.000,00	0,00	0,00
1	Statistik	16.960.474.419,00	1.931.802.400,00	0,00	0,00
1	Persandian	35.614.973.224,00	1.167.477.356,00	0,00	0,00
1		33.763.409.231,00	1.148.190.000,00	0,00	0,00
1		126.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1		126.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1		533.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1		515.505.000,00	0,00	0,00	0,00
1		1.018.900.400,00	600.000,00	0,00	0,00
1		350.100.600,00	0,00	0,00	0,00
1		164.166.783.722,00	24.407.349.354,00	0,00	0,00
1		104.376.786.969,00	19.984.090.165,00	0,00	0,00
1		187.850.106.515,00	7.198.445.700,00	0,00	0,00
1		149.486.368.481,00	3.868.645.811,00	0,00	0,00
1		23.465.838.419,00	826.440.500,00	0,00	0,00
1		15.591.444.629,00	795.129.000,00	0,00	0,00
1		208.693.004.080,00	2.953.966.570,00	146.237.877.183,00	0,00
1		133.234.546.126,00	2.332.585.816,00	91.039.428.798,00	0,00
1		25.061.118.257,00	2.108.898.600,00	0,00	0,00
1		19.298.462.544,00	1.905.020.836,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI	
		KELOMPOK BELANJA					
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER		
1	2	3	4	5	6		
8	3	26	Parwisata	19.254.340.300,00	1.387.526.000,00	0,00	0,00
				15.773.438.575,00	1.136.229.320,00	0,00	0,00
10			<b>Pendidikan</b>	977.730.143.131,00	18.862.217.285,00	0,00	0,00
				868.160.233.088,00	17.988.998.040,00	0,00	0,00
10	1	01	Pendidikan	927.619.017.083,00	17.567.351.500,00	0,00	0,00
				827.061.828.500,00	16.803.564.740,00	0,00	0,00
10	2	19	Kepemudaan dan Olah Raga	35.336.308.656,00	240.398.354,00	0,00	0,00
				29.280.948.068,00	236.845.000,00	0,00	0,00
10	2	23	Perpustakaan	14.774.817.392,00	1.054.467.431,00	0,00	0,00
				11.817.456.520,00	948.588.300,00	0,00	0,00
11			<b>Perlindungan Sosial</b>	151.290.645.302,00	14.263.004.036,00	0,00	0,00
				108.489.360.862,00	12.686.285.180,00	0,00	0,00
11	1	06	Sosial	102.473.784.598,00	4.583.095.000,00	0,00	0,00
				68.678.958.815,00	4.497.175.880,00	0,00	0,00
11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.742.218.704,00	116.817.800,00	0,00	0,00
				10.585.281.966,00	109.327.000,00	0,00	0,00
11	2	12	Administrasi Kependudukan dan Sipil	36.074.642.000,00	9.563.091.236,00	0,00	0,00
				29.225.120.081,00	8.079.782.300,00	0,00	0,00
			<b>JUMLAH</b>	4.721.486.070.425,00	863.671.114.667,00	146.237.877.183,00	0,00
				3.833.501.098.374,87	574.604.617.139,00	91.039.428.798,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,**



**YUNITA SARI, S.H.**  
**PENATA TINGKAT I**  
**NIP. 19700622 200701 2 031**

**WALI KOTA MEDAN,**  
 t t d

**MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTTON**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK,**  
**SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	BERBENTUK (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5 = 4 - 3	6		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 4 - 3</b>	<b>6</b>		
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	5.208.964.175.119,00	5.023.080.346.608,29	(185.883.828.510,71)	96,43		
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	2.139.239.943.474,00	1.906.512.189.047,29	(232.727.754.426,71)	89,12		
4.1.1	<b>Pajak Daerah</b>	1.693.934.904.956,00	1.495.751.738.668,00	(198.183.166.288,00)	88,30		
4.1.1.06	Pajak Hotel	101.142.393.807,00	70.537.230.772,00	(30.605.163.035,00)	69,74		
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	101.142.393.807,00	70.537.230.772,00	(30.605.163.035,00)	69,74		
4.1.1.06.01.0001	Pajak Hotel	101.142.393.807,00	70.537.230.772,00	(30.605.163.035,00)	69,74		
4.1.1.07	Pajak Restoran	250.859.144.795,00	192.958.086.387,00	(57.901.058.408,00)	76,92		
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	250.859.144.795,00	192.958.086.387,00	(57.901.058.408,00)	76,92		
4.1.1.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	250.859.144.795,00	192.958.086.387,00	(57.901.058.408,00)	76,92		
4.1.1.08	Pajak Hiburan	27.397.852.130,00	11.145.988.440,00	(16.251.863.690,00)	40,68		
4.1.1.08.01	Pajak Tontonan Film	3.335.052.678,00	1.249.068.305,00	(2.085.984.373,00)	37,45		
4.1.1.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	3.335.052.678,00	1.249.068.305,00	(2.085.984.373,00)	37,45		
4.1.1.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	54.474.000,00	0,00	(54.474.000,00)	0,00		
4.1.1.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	54.474.000,00	0,00	(54.474.000,00)	0,00		
4.1.1.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	14.179.500.058,00	2.744.510.946,00	(11.434.989.112,00)	19,36		
4.1.1.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	14.179.500.058,00	2.744.510.946,00	(11.434.989.112,00)	19,36		
4.1.1.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	30.532.845,00	0,00	(30.532.845,00)	0,00		
4.1.1.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	30.532.845,00	0,00	(30.532.845,00)	0,00		
4.1.1.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	53.619.364,00	17.972.600,00	(35.646.764,00)	33,52		
4.1.1.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	53.619.364,00	17.972.600,00	(35.646.764,00)	33,52		
4.1.1.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.039.284.876,00	6.308.282.561,00	2.268.997.685,00	156,17		
4.1.1.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.039.284.876,00	6.308.282.561,00	2.268.997.685,00	156,17		
4.1.1.08.09	Pajak Parati Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.701.417.839,00	826.154.028,00	(4.875.263.811,00)	14,49		
4.1.1.08.09.0001	Pajak Parati Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.701.417.839,00	826.154.028,00	(4.875.263.811,00)	14,49		
4.1.1.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	3.970.470,00	0,00	(3.970.470,00)	0,00		
4.1.1.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	3.970.470,00	0,00	(3.970.470,00)	0,00		
4.1.1.09	Pajak Reklame	40.159.473.128,00	45.449.943.526,00	5.290.470.398,00	113,17		

RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	BETAMBAH / (BERKURANG) (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		
5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	146.237.877.183,00	91.039.428.798,00	(55.198.448.385,00)	62,25		
5.3.1.01.01	Belanja Tidak Terduga	146.237.877.183,00	91.039.428.798,00	(55.198.448.385,00)	62,25		
5.3.1.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	146.237.877.183,00	91.039.428.798,00	(55.198.448.385,00)	62,25		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(522.430.887.156,00)	523.935.202.296,42	1.046.366.089.452,42	(100,29)		
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>						
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>						
6.1.1.05	Penghematan Belanja	622.430.887.156,00	622.661.218.417,83	230.331.261,83	100,04		
6.1.1.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	622.430.887.156,00	622.430.887.156,83	0,83	100,00		
6.1.1.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	622.430.887.156,00	622.430.887.156,83	0,83	100,00		
6.1.1.99	Koreksi SILPA	0,00	230.331.261,00	230.331.261,00	0,00		
6.1.1.99.01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	230.331.261,00	230.331.261,00	0,00		
6.1.1.99.01.0001	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	230.331.261,00	230.331.261,00	0,00		
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>						
6.2.2	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>						
6.2.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	100.000.000.000,00	0,00	(100.000.000.000,00)	0,00		
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	100.000.000.000,00	0,00	(100.000.000.000,00)	0,00		
6.2.2.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	100.000.000.000,00	0,00	(100.000.000.000,00)	0,00		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>						
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	522.430.887.156,00	622.661.218.417,83	100.230.331.261,83	119,19		
		0,00	1.146.596.420.714,25	1.146.596.420.714,25	0,00		

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, S.H.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19700622 200701 2 031

WALI KOTA MEDAN,  
t t d  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTTON



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	2	3	4	5
1				
A	SPM Bidang Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	102,704,638,346.00 50,952,351,998.00	104,758,094,636.00 51,226,299,413.00
	<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan</b>		<b>153,656,990,344.00</b>	<b>155,984,394,049.00</b>
	<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan</b>			
B	SPM Bidang Kesehatan	1. Peningkatan Pelayanan BLUD 2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	161,234,469,711.00 78,159,212,922.00	87,648,898,460.00 67,004,859,849.00
	<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan</b>		<b>239,393,682,633.00</b>	<b>154,653,758,309.00</b>
	<b>Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	120,912,742,606.00 273,108,163,964.00	79,217,861,675.00 148,581,639,730.00
	<b>Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>394,020,906,570.00</b>	<b>227,799,501,405.00</b>
	<b>Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>			
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 2. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	123,018,751,194.00 112,603,851,320.00	42,197,147,025.00 98,829,529,789.00
	<b>Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>		<b>235,622,602,514.00</b>	<b>141,026,676,814.00</b>

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	2	3	4	5
1	SPM Bidang Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30,936,089,298.00	28,046,552,148.00
E		2. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8,247,059,280.00	7,716,453,720.00
	<b>Jumlah SPM Bidang Ketenteraman dan Keterlibatan Umum</b>		<b>39,183,148,578.00</b>	<b>35,763,005,868.00</b>
F	SPM Bidang Sosial	1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	73,969,167,335.00	54,335,840,680.00
		2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8,085,303,684.00	4,873,750,210.00
	<b>Jumlah SPM Bidang Sosial</b>		<b>82,054,471,019.00</b>	<b>59,209,590,890.00</b>

WALI KOTA MEDAN

t t d

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
YUNITA SARI, S.H.

PENATA TINGKAT I

NIP. 19700622 200701 2 031